Lampiran I Pengumuman:
Nomor : P. 4 / Setmen.Birosdmu /KP.02.01/8/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN			JUMLAH KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
			UMUM	KHUSUS			
				Disabilitas	Putra/Putri Kalimantan		
1.	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1			1	SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
2.	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1			1	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
3.	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1			1	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER
4.	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1			1	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
5.	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1			1	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
6.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1			1	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER
7.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1			1	ASISTEN DEPUTI PELAYANAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
8.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1			1	ASISTEN DEPUTI PELAYANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
9.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1			1	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN			JUMLAH KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
			UMUM	KHUSUS			
				Disabilitas	Putra/Putri Kalimantan		
10.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	2			2	SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
11.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI / S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 ILMU POLITIK	1			1	SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
12.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN / S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1		1	2	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
13.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1			1	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
14.	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV ADMINISTRASI PAJAK / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK /	2			2	INSPEKTORAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN			JUMLAH KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
			UMUM	KHUSUS			
				Disabilitas	Putra/Putri Kalimantan		
		S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN					
15.	AUDITOR TERAMPIL	D-III AKUNTANSI / D-III AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III ADMINISTRASI PAJAK / D-III ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN	3			3	INSPEKTORAT
16.	MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER / D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK / S-1 INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER JARINGAN / S-1 REKAYASA KOMPUTER / D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 SISTEM	2		1	3	BIRO DATA DAN INFORMASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN			JUMLAH KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
			UMUM	KHUSUS			
				Disabilitas	Putra/Putri Kalimantan		
		INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER					
17.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	1		2	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER
18.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	1		2	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
19.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2			2	SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
20	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PSIKOLOGI / S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING	2			2	SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
21.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING	4			4	ASISTEN DEPUTI PELAYANAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
22.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU	2			2	ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK KONDISI KHUSUS